



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan Kebijakan Fiskal
Juni 2020

Fungsi Perpajakan/Cukai

Fungsi Regulerend dan Fungsi Budgetair



Regulerend

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi seperti pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, dll



Budgetair

sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya

Filosofi Cukai

Pengendalian konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif

Filosofi Pengenaan Cukai Berdasarkan Pasal 2 UU Cukai:

Konsumsinya perlu dikendalikan

Peredarannya perlu diawasi

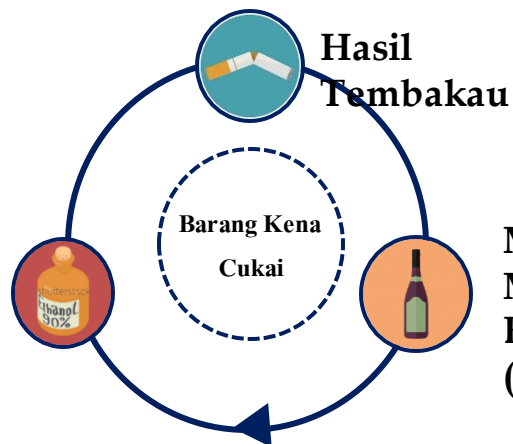
Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

➤ 3 Jenis Barang Kena Cukai di Indonesia:

Penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Ethyl Alcohol/
Ethanol



Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)



Policy Objectives Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan cukai bertujuan mengendalikan konsumsi, menjaga perkembangan industri, dan optimalisasi penerimaan negara



PENGENDALIAN KONSUMSI

Kebijakan pengenaan cukai ditujukan untuk menjalankan fungsi pengendalian konsumsi (Pasal 2 UU Cukai)



PERKEMBANGAN INDUSTRI

- Kebijakan cukai memperhatikan karakteristik industri Hasil Tembakau
- Kebijakan cukai memperhatikan industri sigaret/kretek tangan yang padat karya dan memiliki kandungan lokal yang tinggi



OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Kebijakan cukai diarahkan untuk pencapaian target penerimaan negara dalam APBN



Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau

penggolongan produksi, sistem tarif, dan simplifikasi

Sistem Cukai 1995 - saat ini

1995-2007

2007-2008

2009 - saat ini

Advolorem

Hybrid

Specific

JENIS HT	GOL. PRODU KSI 2018	BATASAN PRODUKSI 2018 (batang)	Batasan HJE 2018 (Rp)	2011	2012	2013-2014	2015	2016	2017	2018
				(Rp)						(Rp)
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	I	> 3 milyar	1.120						530	590
	II	≤ 3 milyar	>895						365	385
			715-895						335	370
Sigaret Putih Mesin (SPM)	I	> 3 milyar	1.130						555	625
	II	≤ 3 milyar	>935						330	370
			640-935						290	355
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	I	> 2 milyar	>1.260						345	365
			890-1.260						265	290
	II	> 500 jt – 2 milyar	470						165	180
									155	
									100	
	III	≤ 500juta	400						80	100
JUMLAH LAYER				19	15	13	12	12	12	10

Tujuan Penyederhanaan Struktur/Layer Tarif Cukai Hasil Tembakau:

- ✓ Meningkatkan tingkat compliance (hasil survey P2EB UGM)
- ✓ Meminimalisir peredaran rokok ilegal (Tax Avoidance/Penghindaran Pajak)
- ✓ Penyederhanaan sistem administrasi
- ✓ Optimalisasi penerimaan negara
- ✓ Menghilangkan rentang harga (mendorong kenaikan harga rokok)



KEBIJAKANTARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN TAHUN 2020 (PMK 152/2019)

JENIS ROKOK	GOL Produksi	TARIF CUKAI 2018/2019	TARIF CUKAI 2020	Batasan HJE Min. 2018/2019	Batasan HJE Min. 2020
		(Rp/Btg)			
SKM	1	590	740	1.120	1.700
	2	385	470	896	1.275
		370	455	715	1.020
SKT	1	365	425	1.261	1.460
		290	330	890	1.015
	2	180	200	470	535
	3	100	110	400	450
SPM	1	625	790	1.130	1.790
	2	370	485	936	1.485
		355	470	640	1.015

KENAIKAN TARIF CUKAI:

1. Jenis SKM berada dikisaran 22% - 25%
2. Jenis SKT berada dikisaran 10% - 16%
3. Jenis SPM berada dikisaran 26% - 32%

KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN:

1. Jenis SKM berada dikisaran 42% - 52%
2. Jenis SKT berada dikisaran 13% - 16%
3. Jenis SPM berada dikisaran 58% - 59%

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN:

1. Jenis Hasil Tembakau (buatan mesin/tangan)
2. Jenis Industri (padat modal dan padat karya),
3. Golongan Produksi Pabrikasi (besar, menengah, dan kecil),
4. Tingkat Kandungan Bahan Baku Dalam Negeri (tembakau dan cengkeh)

ESTIMASI KONDISI DI TAHUN 2020:

1. Penerimaan Cukai HT: Rp 176,1 Triliun
2. Pencapaian Target Penerimaan Cukai: 101,7%
3. Penurunan Produksi: -10,6%





Penggolongan Pabrikan, Batasan HJE, dan Tarif Cukai (PMK 152/2019)

No Urut	Gol Pengusaha		Batasan HJE	Tarif Cukai
	Jenis	Gol		
1	SKM	I	>Rp 1.700	Rp 740
		II	>Rp 1.275	Rp 470
			Rp 1.020 - Rp 1.275	Rp 455
2	SPM	I	>Rp 1.790	Rp 790
		II	>Rp 1.485	Rp 485
			Rp 1.015 - Rp 1.485	Rp 470
3	SKT atau SPT	I	>Rp 1.460	Rp 425
			Rp 1.015 - Rp 1.460	Rp 330
		II	>Rp 535	Rp 200
		III	>Rp 450	Rp 110
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Gol	>Rp 1.700	Rp 740
5	TIS	Tanpa Gol	>Rp 275	Rp 30
				Rp 25
				Rp 10
6	KLB	Tanpa Gol	>Rp 290	Rp 30
7	KLM	Tanpa Gol	>Rp 200	Rp 25
8	CRT	Tanpa Gol	>Rp 198.000	Rp 110.000
			>Rp 55.000 - Rp 198.000	Rp 22.000
			>Rp 22.000 - Rp 55.000	Rp 11.000
			>Rp 5.500 - Rp 22.000	Rp 1.320
			>Rp 495 - Rp 5.500	Rp 275





HJE Minimum dan Tarif Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (PMK 156/2018)

No Urut	Produk HPTL	HJE Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1	Ekstraks dan Essens Tembakau, berupa:			57%
	a. Batang	Rp 1.350	per batang	
	b. Cartridge	Rp 30.000	per cartridge	
	c. Kapsul	Rp 1.350	per kapsul	
	d. Cair	Rp 666	per mililiter	
2	Tembakau Molasses	Rp 175	per gram	
3	Tembakau Hirup	Rp 175	per gram	
4	Tembakau Kunyah	Rp 175	per gram	





POKOK-POKOK KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU 2020

Dalam penetapan kebijakan cukai, pemerintah memperhatikan berbagai aspek...

1. Cukai merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok
2. Tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2019, pemerintah di tahun 2020 menyesuaikan tarif cukai rokok melalui PMK 152/2019
3. Dalam penetapan kebijakan dalam PMK tersebut, tentunya pemerintah memperhatikan berbagai aspek, antara lain :
 - a. Tingkat prevalensi merokok
 - b. Kondisi pasar (perkembangan harga pasar dengan harga banderol),
 - c. Capaian penerimaan cukai
 - d. Kinerja industri rokok
 - e. Keberlangsungan tenaga kerja
 - f. Pengendalian rokok ilegal nasional yang sudah bisa ditekan sekitar 3,03%
4. Kebijakan kenaikan tarif juga memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja khususnya yang padat karya dan industri kecil, baik buruh, petani tembakau, dan petani cengkeh
5. Pertimbangan agar harga rokok per kemasan di pasaran tidak mudah dijangkau oleh kalangan anak-anak.
6. Besaran kenaikan tarif cukai dikenakan secara proposional dimana industri padat karya mendapat beban yang lebih rendah dibandingkan industri padat modal.



Kebijakan Cukai Hasil Tembakau yang telah dilakukan

1 Penyesuaian Tarif Cukai

2 Penyesuaian Harga Jual Eceran Minimum

3 Penyederhanaan struktur tarif cukai dan sistem administrasi

4 Pengaturan produk hasil pengolahan tembakau lainnya (*e-cigarette*)

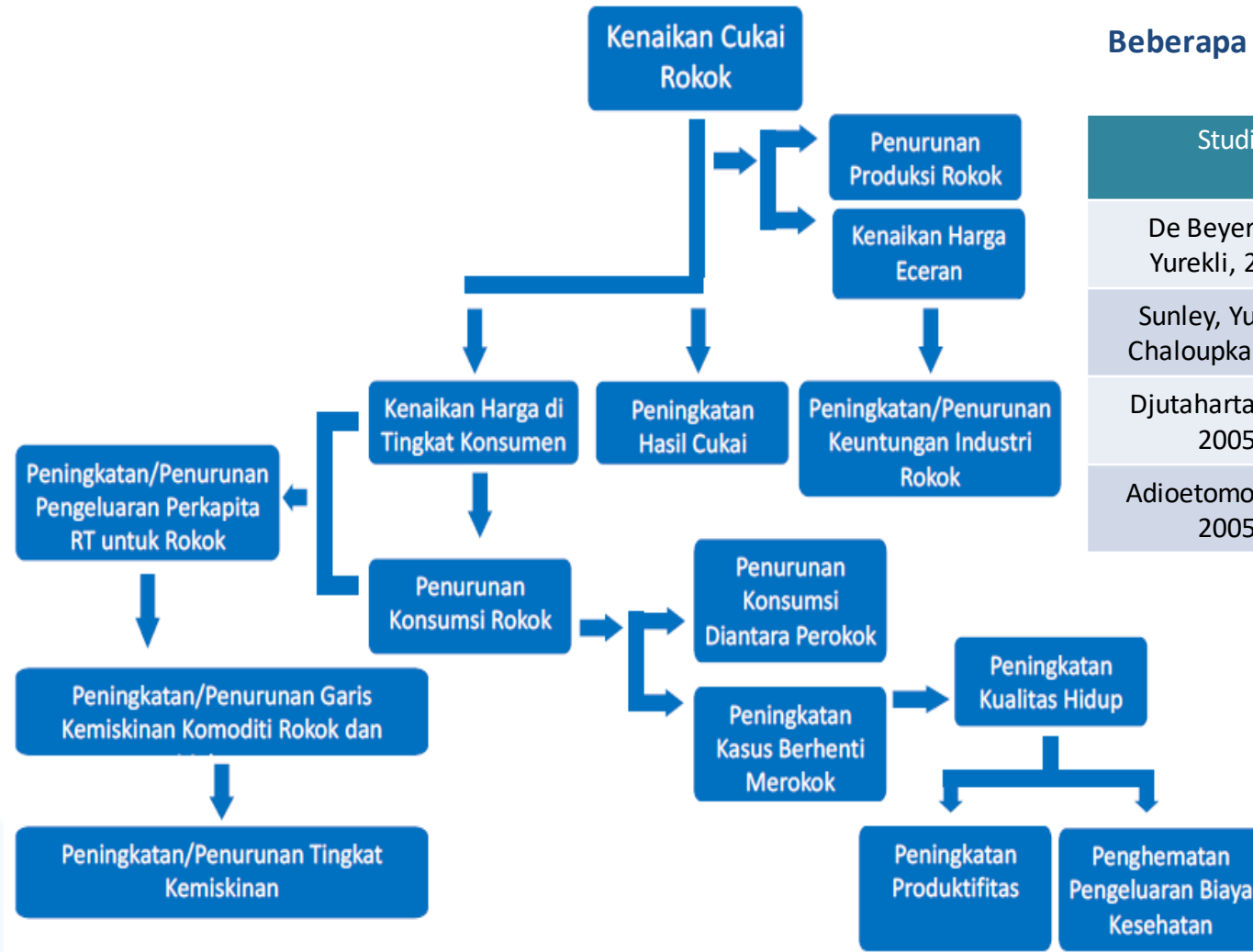
5 Pengaturan batas minimal Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau (85% HJE)

6 Minimalisasi peredaran rokok ilegal



Dampak Kenaikan Cukai Rokok Terhadap Indikator Makro, Mikro dan Kualitas Hidup

Kenaikan cukai rokok berdampak pada peningkatan kualitas hidup



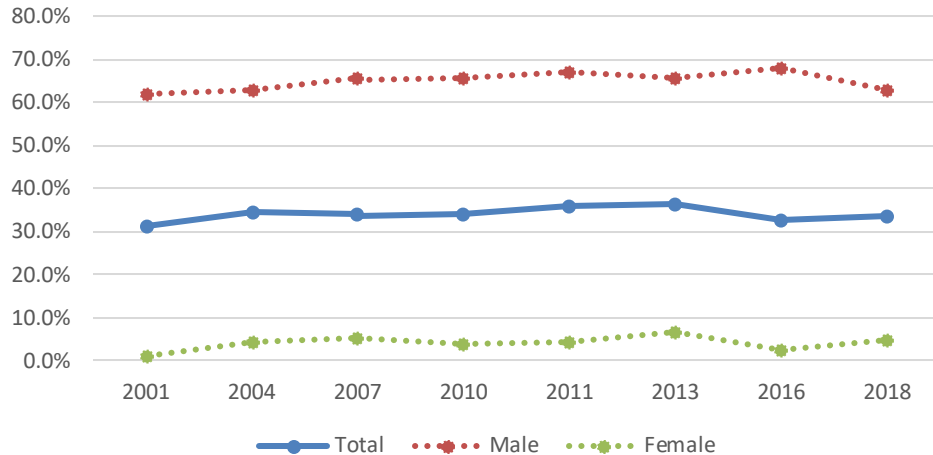
Beberapa Studi Dampak Peningkatan 10% Tarif Cukai Rokok:

Studi	Penurunan Konsumsi	Peningkatan Penerimaan
De Beyer and Yurekli, 2000	2%	8%
Sunley, Yurekli, Chaloupka, 2000	2,4%	7,4%
Djutaharta et al, 2005	0,9%	9,0%
Adioetomo et al, 2005	3,0%	6,7%

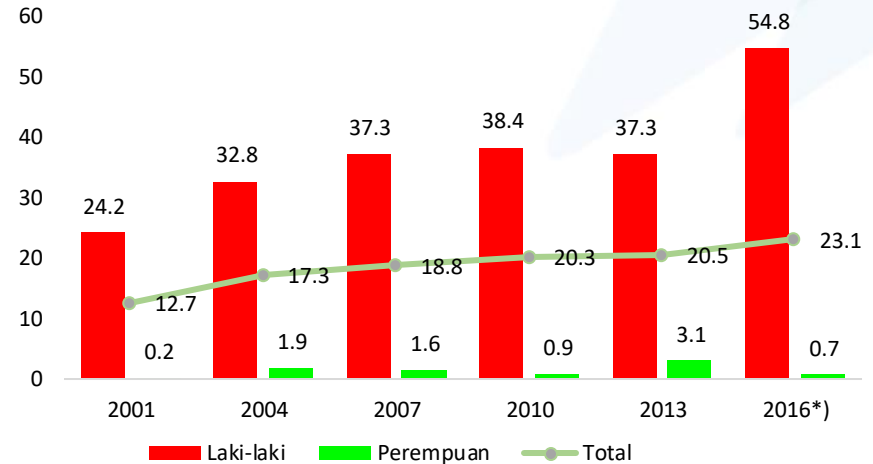
Prevalensi Konsumsi Rokok di Indonesia

Prevalensi meningkat di tahun 2018 secara umum

Prevalensi Konsumsi Tembakau pada Populasi umur > 15 tahun



Persentase Perokok Remaja Indonesia Usia 15-19 tahun, Tahun 2001- 2016



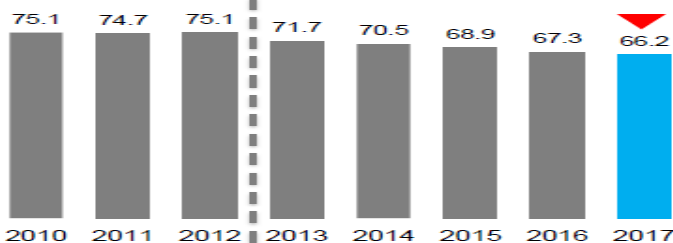
Sumber: Riskesdas dan Sirkesnas

➤ Tidak hanya dari aspek fiskal, diperlukan juga upaya preventif dan promotif (aspek non-fiskal) baik dari K/L, Pemda, maupun LS/GO dalam upaya menurunkan tingkat prevalensi merokok terutama di kalangan usia Remaja.

Prevalensi Perokok Laki-laki Dewasa Dari Tahun Ke Tahun

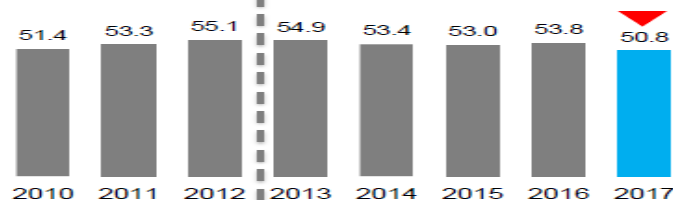
Prevalensi Merokok 3+ Btg/hari

Perubahan metode riset prevalensi



Prevalensi Merokok 10+ Btg/hari

Perubahan metode riset prevalensi



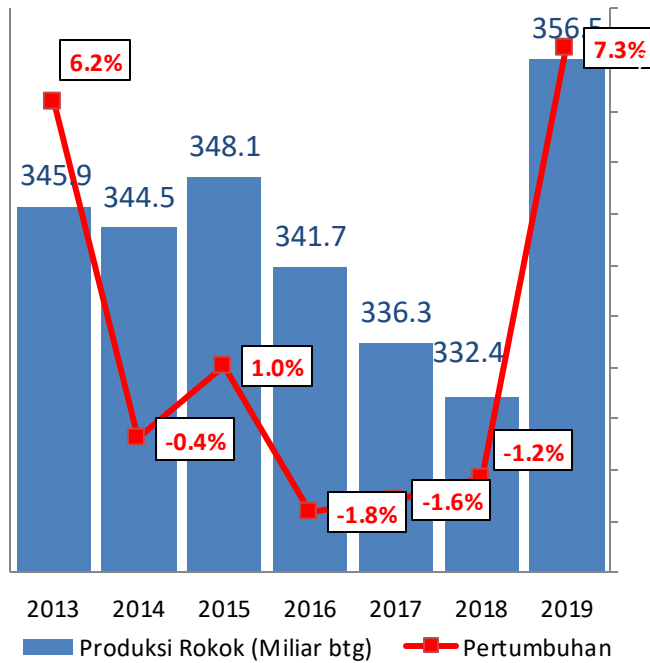
Di level nasional, prevalensi perokok laki-laki dewasa menurun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tren penurunan ini terjadi sejak 2013)



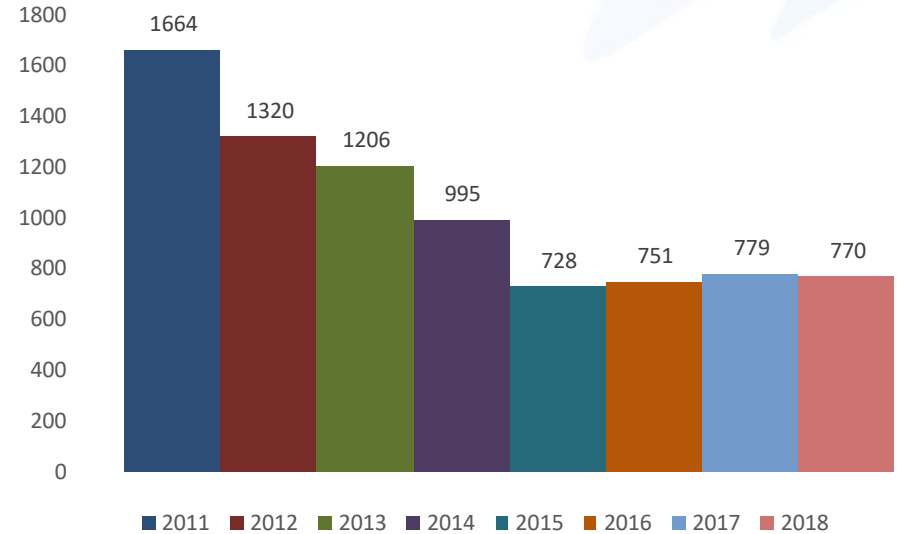
Produksi Hasil Tembakau Mengalami Penurunan (2015-2018)

Total Produksi dan Pertumbuhan Hasil Tembakau menurun, tahun 2019 produksi naik menjadi 356,5 m batang / naik 7,3% karena tidak ada kenaikan tarif cukai

Perkembangan Produksi Hasil Tembakau



Perkembangan Pabrik Hasil Tembakau

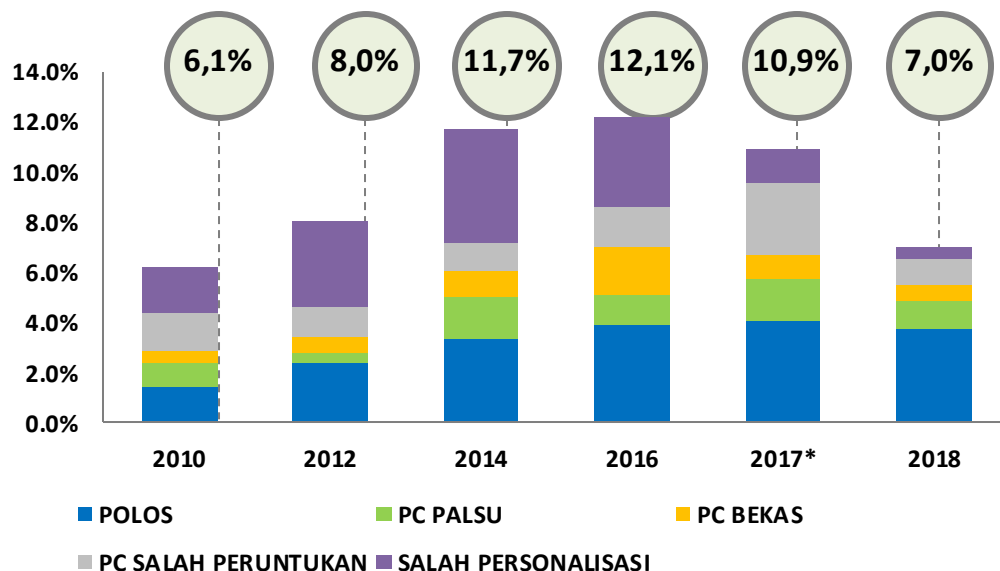


Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pabrik hasil tembakau relatif stagnan di kisaran 700 pabrik aktif

- Total produksi hasil tembakau kembali meningkat di tahun 2019 dan realisasi penerimaan cukai meningkat sebesar 7,8%
- jumlah pabrik hasil tembakau di 2018 mengalami penurunan sebesar 54% dibandingkan tahun 2011

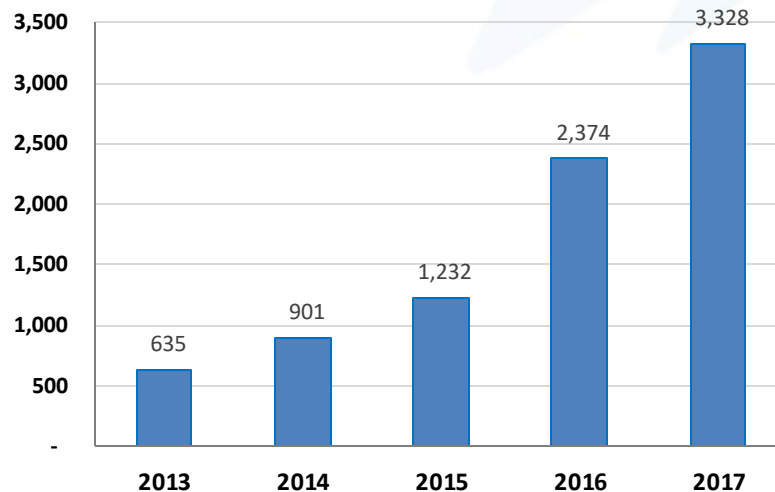
Perkembangan Rokok Ilegal Nasional

TINGKAT PEREDARAN ROKOK ILEGAL



Sumber : survey rokok ilegal nasional – UGM (2010-2018), survey rokok ilegal DJBC (2017), diolah

INTENSITAS PENINDAKAN



Sumber : app.penindakan.net, Dit. Penindakan dan Penyidikan, diolah

Pelanggaran pita cukai rokok dikategorikan menjadi rokok yang dijual dengan:

1. Menggunakan Pita Cukai Asli namun **Salah Personalisasi**
2. Menggunakan Pita Cukai Asli namun **Salah Peruntukan**
3. Menggunakan Pita Cukai **Palsu**
4. Menggunakan Pita Cukai **Bekas**
5. Tanpa Pita Cukai (**Polos**)

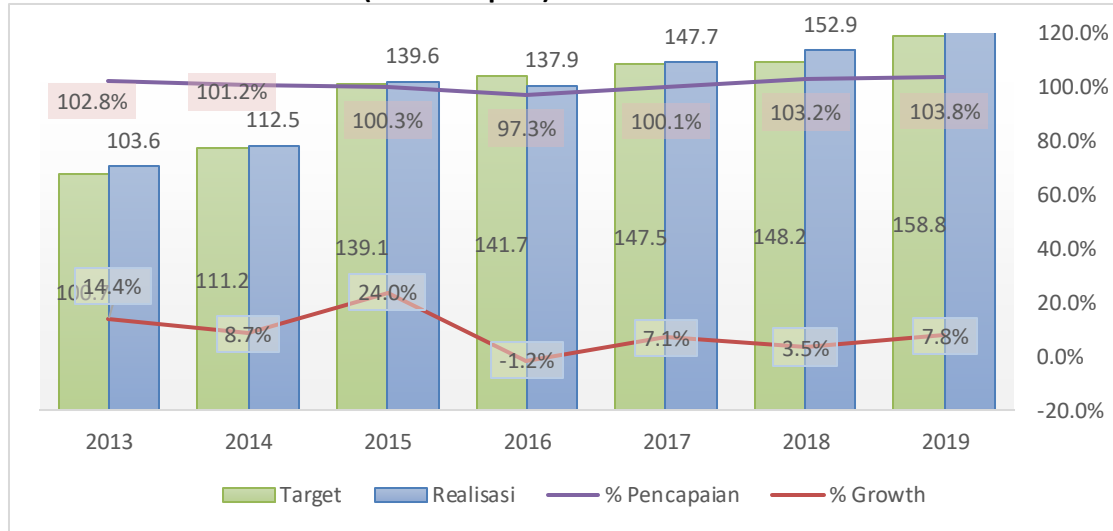
Dalam kasus **Kawasan Bebas (FTZ)**, terdapat klasifikasi tambahan: tanpa label kawasan bebas, atau sebaliknya rokok FTZ yang beredar diluar FTZ.

“Tingkat peredaran rokok ilegal (*Tax Evasion*) cenderung menurun seiring dengan semakin meningkatnya intensitas penindakan/penegakan hukum dan kampanye pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC di lapangan secara masif di berbagai daerah termasuk penindakan rokok “rembesan” kawasan bebas batam (free trade zone)”

Kontribusi Penerimaan Cukai Strategis Terhadap Penerimaan Perpajakan

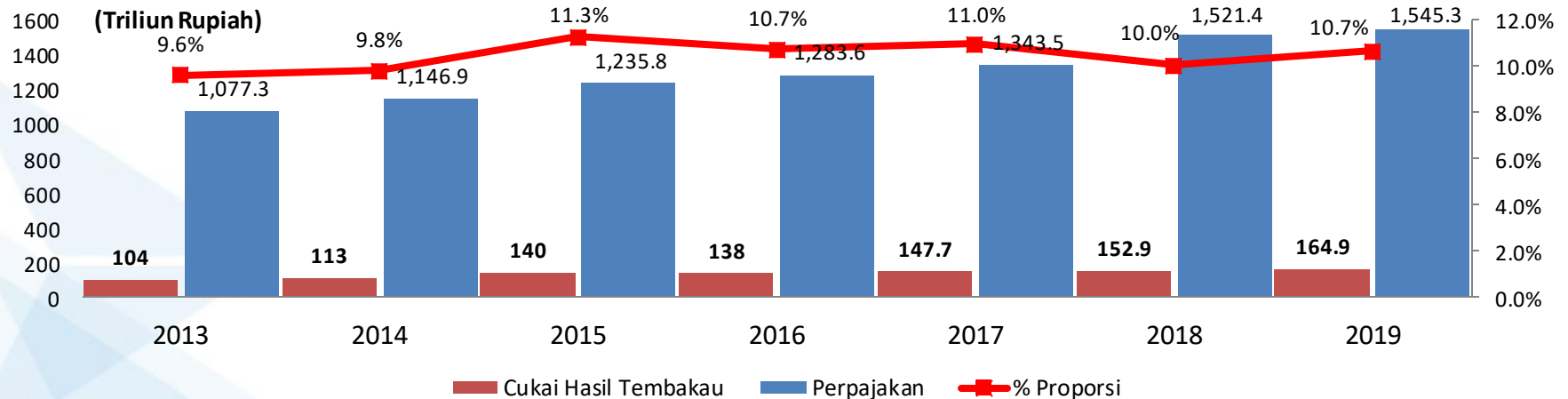
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 2013-2019

(Triliun Rupiah)



- Rata-rata kenaikan penerimaan cukai HT 10%
- Pertumbuhan penerimaan melambat pada 2016-2018 karena penurunan produksi HT
- Penerimaan cukai selalu melebihi target Dalam 4 tahun terakhir, penerimaan stagnan di bawah 105 kecuali tahun 2016 sebagai dampak PMK-20.

Total Penerimaan Cukai HT vs Total Penerimaan Perpajakan





Penerimaan Perpajakan (2018-2020)

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Mei karena kontraksi penerimaan bulan Mei cukup dalam sebagai dampak perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	2018			2019			2020				
	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP	Growth (%)	LKPP Unaudited	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP Unaudited	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd Perubahan APBN	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	484,9	36,9	14,2	1.332,7	498,5	37,4	2,8	1.254,1	444,6	35,4	(10,8)
1. PPh Migas	25,4	39,3	3,0	59,2	26,4	44,5	3,7	43,7	17,0	38,8	(35,6)
2. Pajak Nonmigas	459,5	36,8	14,9	1.273,5	472,2	37,1	2,8	1.210,4	427,6	35,3	(9,4)
a. PPh Nonmigas	274,8	40,1	14,3	713,1	295,5	41,4	7,5	659,6	264,8	40,2	(10,4)
b. PPN	181,3	33,7	16,2	531,6	173,8	32,7	(4,1)	529,7	160,0	30,2	(8,0)
c. PBB	0,1	0,8	(76,5)	21,1	0,4	1,7	149,6	13,4	0,4	3,2	16,8
d. Pajak Lainnya	3,3	49,4	18,7	7,7	2,5	32,4	(24,0)	7,7	2,3	30,3	(6,4)
B. Kepabeanaan dan Cukai	53,8	26,2	17,4	213,5	72,7	34,0	35,1	208,5	81,7	39,2	12,4
1. Cukai	35,5	22,3	15,3	172,4	56,2	32,6	58,3	172,9	66,8	38,6	18,8
2. Pajak Perdagangan Internasional	18,3	39,8	21,7	41,1	16,5	40,1	(9,9)	35,6	14,9	41,8	(9,6)
a. Bea Masuk	15,5	39,6	14,6	37,5	15,0	39,9	(3,3)	33,9	13,8	40,7	(7,9)
b. Bea Keluar	2,8	41,2	85,9	3,5	1,5	42,5	(46,3)	1,8	1,1	62,1	(27,5)
JUMLAH	538,7	35,5	14,5	1.546,1	571,2	36,9	6,0	1.462,6	526,2	36,0	(7,9)

- Sampai dengan akhir Mei 2020, penerimaan pajak secara total mencapai Rp 444,6 T, tumbuh -10,8% dengan PPh Migas turun 35,6% dan Pajak Nonmigas turun 9,4%
- Pendapatan dari PPh Nonmigas hanya sebesar Rp 264,8 T (-10,4%) dan dari PPN sebesar 160 T (-8,0%)
- Untuk penerimaan Kepabeanaan dan Cukai, sampai dengan akhir Mei 2020, masih tumbuh positif 12,4% dengan kontributor utama pendapatan dari Cukai sebesar Rp 66,8 T yang tumbuh sebesar 18,8%
- Adapun pendapatan dari pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar), mengalami penurunan sebesar 9,6%



Realisasi Penerimaan DJBC 2020

Pelemahan ekonomi terkonfirmasi dengan penurunan bea masuk dan bea keluar, adanya pertumbuhan didorong oleh penerimaan cukai.
dalam triliun rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 54/2020	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	33.88	14.97	13.79	-3.32	-7.86	40.72
2	CUKAI	172.90	56.21	66.63	58.27	18.54	38.54
	Hasil Tembakau	165.65	53.66	64.65	60.17	20.46	39.03
	Ethil Alkohol	0.15	0.05	0.17	-12.20	226.99	107.62
	MMEA	7.10	2.46	1.79	27.79	-27.32	25.19
	Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.02	19.68	-7.36	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	54.33	-27.83	-
	Plastik	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	1.75	1.50	1.09	-46.28	-27.45	62.13
TOTAL		208.52	72.68	81.51	35.12	12.15	39.09
	PPN Impor		71.14	60.61	-2.71	-14.80	
	PPn BM Impor		1.65	1.58	-10.97	-4.18	
	PPh Pasal 22 Impor		23.86	17.90	0.62	-24.97	
	Total PDRI lainnya		96.65	80.09	-2.07	-17.13	
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			169.32	161.60	11.05	-4.56	

Sumber : Bukmer Run 3 Juni 2020



- Realisasi penerimaan DJBC Rp **81.51 T (39.09%** Target APBN Perpres 54/2020)
- Penerimaan tumbuh sebesar **Δ12.15%**
- Pertumbuhan didorong oleh penerimaan **Cukai (Δ18,54%)**



Arah Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Ke Depan

Kebijakan cukai dirumuskan dengan mempertimbangkan ***policy objectives yang relevan*** (pengendalian konsumsi, perkembangan industri, optimalisasi penerimaan negara)

Kebijakan cukai hasil tembakau dapat turut mempengaruhi kesehatan masyarakat (penurunan prevalensi merokok) yang pada akhirnya **mempengaruhi perbaikan kualitas SDM dan keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional**

Komunikasi public untuk mendapatkan input terkait rencana kebijakan cukai, mengingat adanya dampak kebijakan dimaksud terhadap industri rokok dan tenaga kerja, termasuk petani tembakau, petani cengkeh.

Perkembangan baru seperti ***new type of cigarettes (electric)*** perlu menjadi perhatian karena mulai banyak dikonsumsi (terutama oleh masyarakat menengah ke atas)

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan penggunaan dari DBH cukai HT dan pajak rokok untuk program kesehatan, program peralihan tenaga kerja, dan program peningkatan pertanian tembakau.

KOLABORASI DAN SINERGI SELURUH OTORITAS TERKAIT DAN SELURUH MASYARAKAT

Terima Kasih

